

RINGKASAN

Muhammad Reza Fahlevy
190510198

**PENEMPATAN ANAK PADA LEMBAGA
PERMASYARAKATAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**
(**Dr. Zul Akli, S.H., M.H. Dan Hidayat , S.H., M.H.**)

Di Indonesia pengaturan mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Salah satu substansi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penempatan ABH ke dalam LPKA, akan tetapi di setiap tahunnya terdapat adanya kasus ABH yang di tempatkan ke dalam LAPAS bersama dengan orang dewasa, hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Jo 85 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penempatan anak ke dalam lapas dewasa berdasarkan prinsip perlindungan anak. Manfaat yang dilaksanakan adalah untuk memberikan informasi dan menambah wawasan baru serta menambah kesadaran kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat secara luas terkait dengan dampak yang dapat di timbulkan akibat dari pencampuran anak bersama dengan orang dewasa di dalam lapas. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang berfokus pada perlindungan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pencampuran anak bersama dengan orang dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan ini menimbulkan permasalahan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak serta menimbulkan *prisonisasi*.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah penempatan anak bersama dengan orang dewasa di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan Prinsip perlindungan dan tidak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, hal ini dikarenakan pencampuran tersebut menimbulkan adanya permasalahan terkait dengan hak dasar yang dimiliki oleh anak dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan yakni melakukan rehabilitasi dan justru menimbulkan adanya *prisonisasi*. Bagi para pihak baik Pemerintah maupun masyarakat, diperlukan adanya sebuah pemahaman yang menyeluruh terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai proses penyelenggaraan SPPA.

Kata kunci: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak, Lembaga Pemasyarakatan

SUMMARY

Muhammad Reza Fahlevy 190510198 *PLACEMENT OF CHILDREN IN COMMUNITY INSTITUTIONS IS REVIEWED FROM THE LAW ON THE CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H. and Hidayat , S.H., M.H.)

In Indonesia, regulations regarding the implementation of the Juvenile Criminal Justice System have been regulated in Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. One of the substances regulated in the regulation is related to the placement of ABH into LPKA, however every year there are cases of ABH being placed in correctional institutions together with adults, this is contrary to the provisions in Article 3 Jo 85 of the Law -Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The aim of this research is to analyze the placement of children in adult prisons based on child protection principles. The benefit of this implementation is to provide information and add new insights and increase awareness to Law Enforcement Officials and the community at large regarding the impacts that can arise as a result of mixing children with adults in prisons. This research was conducted using a qualitative approach with a type of empirical research that focuses on child protection. The results of the research show that mixing children with adults in correctional institutions causes problems with the basic rights of children and causes prisonization.

The conclusion that can be drawn is that placing children together with adults in correctional institutions is not in accordance with the principle of protection and is not in accordance with the principle of the best interests of the child as regulated in Article 2 letter d of the SPPA Law, this is because this mixing creates The problem is related to the basic rights that children have and is not in accordance with the duties and functions of correctional institutions, namely carrying out rehabilitation and actually giving rise to prisonization. For parties, both the Government and the community, a comprehensive understanding of the regulations governing the SPPA implementation process is required.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System Law, Child Protection, Correctional Institutions